

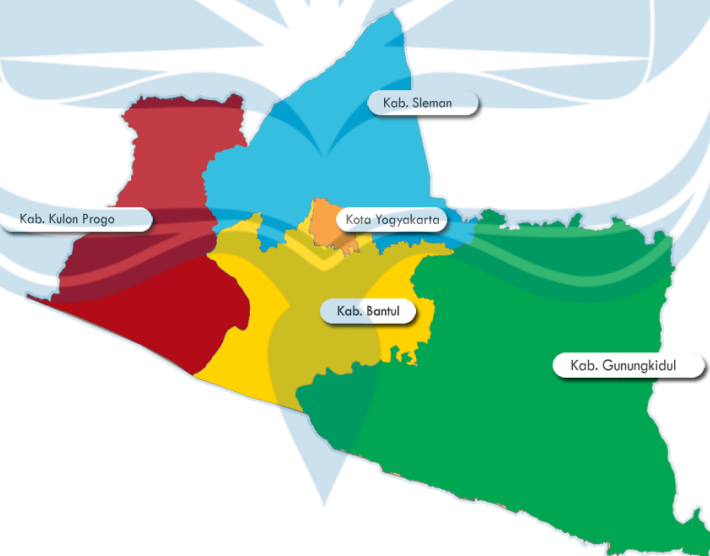
BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Pariwisata Indonesia

2.1.1. Pergerakan Wisatawan di Obyek-Obyek Wisata di DIY

Menurut data statistik kepariwisataan DIY tahun 2021, Kota Yogyakarta memiliki cukup banyak destinasi wisata. Data menunjukkan jumlah obyek wisata alam, obyek wisata budaya, obyek wisata buatan, dan desa/kampung wisata mencapai 274 obyek.

Pada pandemi Covid-19 lalu, beberapa obyek wisata sempat tidak beroperasi untuk sementara waktu dan berakibat pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan di DIY. Secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6.063 orang dan wisatawan nusantara mencapai 7.854.170 orang yang berkunjung ke obyek-obyek wisata. Dan berikut adalah data pergerakan kunjungan wisatawan di tiap kabupaten/kota di DIY (DIY D. P., 2022) :



Gambar 2. 1 Peta Yogyakarta

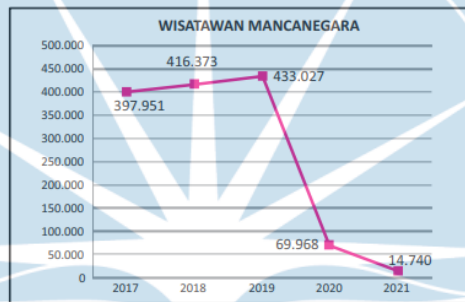
Sumber : <https://dikpora.jogjapro.go.id/web/views/themes/dikpora/assets/images/theme-content/images/map-dark.png> diakses pada (28 September 2022)

1. Kota Yogyakarta dengan jumlah 827 wisatawan mancanegara dan 458.435 wisatawan nusantara, dengan jumlah total orang 459.262 wisatawan.
2. Kab. Sleman dengan jumlah 5.162 wisatawan mancanegara dan 1.723.256

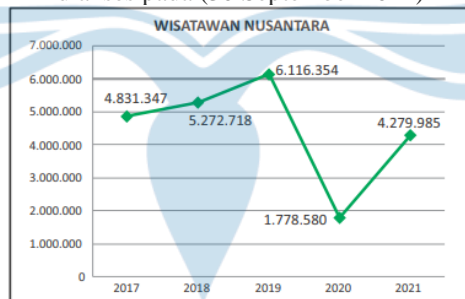
- wisatawan nusantara, dengan jumlah total orang 1.728.418 wisatawan.
3. Kab. Bantul dengan jumlah 57 wisatawan mancanegara dan 2.819.691 wisatawan nusantara, dengan jumlah total orang 2.819.748 wisatawan.
 4. Kab. Kulon Progo dengan jumlah 9 wisatawan mancanegara dan 909.098 wisatawan nusantara, dengan jumlah total orang 909.107 wisatawan.
 5. Kab. Gunung Kidul dengan jumlah 8 wisatawan mancanegara dan 1.937.627 wisatawan nusantara, dengan jumlah total orang 1.937.635 wisatawan.

2.1.2. Perkembangan Wisatawan ke DIY Tahun 2017-2021

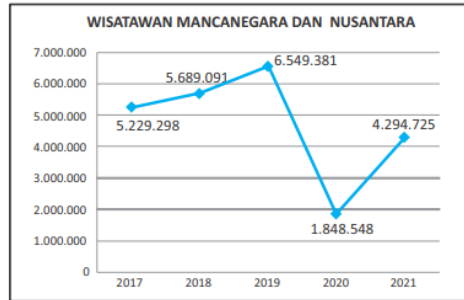
Menurut data statistik kepariwisataan DIY tahun 2021, perkembangan jumlah wisatawan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 hingga 2021. Perkembangan jumlah wisatawan tersebut tercantum pada diagram di gambar 2.2 hingga 2.4. (DIY D. P., 2022)



Gambar 2. 2 Grafik Perkembangan Wisatawan Mancanegara ke DIY Tahun 2017 - 2021
 Sumber : <https://visitingjogja.jogjapro.gov.id/webdinas/download-category/statistik-pariwisata/>
 diakses pada (30 September 2022)



Gambar 2. 3 Grafik Perkembangan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2017 - 2021
 Sumber : <https://visitingjogja.jogjapro.gov.id/webdinas/download-category/statistik-pariwisata/>
 diakses pada (30 September 2022)



Gambar 2. 4 Grafik Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke DIY Tahun 2017 - 2021

Sumber : <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas/download-category/statistik-pariwisata/> (diakses pada 30 September 2022)

2.1.3. Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY Tahun 2017-2021

Menurut data statistik kepariwisataan DIY tahun 2021, pertumbuhan kunjungan wisatawan di tahun 2021 mencapai presentase tertinggi selama 5 tahun terakhir. Data pertumbuhan kunjungan wisatawan ke DIY dapat dilihat pada tabel 2.1. (DIY D. P., 2022)

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY Tahun 2017-2021

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	Pertumbuhan (%)
2017	397.951	29,00	4.831.347	9,98	5.229.298	10,37
2018	416.373	4,63	5.272.718	9,14	5.689.091	8,79
2019	433.027	4,00	6.116.354	16,00	6.549.381	15,12
2020	69.968	-83,84	1.778.580	-70,92	1.848.548	-71,78
2021	14.740	-78,93	4.279.985	140,64	4.294.725	132,33

Sumber : <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas/download-category/statistik-pariwisata/> (diakses pada 30 September 2022)

2.2. Konsep Pariwisata Berkelanjutan

2.2.1. Pengertian

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempertahankan eksistensinya untuk jangka waktu yang panjang. Saat proses perkembangan, jenis pariwisata ini memperhatikan kebutuhan wisatawan dengan cara mencapai keseimbangan antara 3 aspek yaitu bagi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Selain itu, menurut (Hadiwijoyo, 2012) menyatakan jika model pariwisata berkelanjutan dinilai lebih “menjanjikan” karena mengandung wawasan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Karena indikator suatu keberhasilan pembangunan tidak sebatas ditentukan oleh seberapa banyak kontribusi yang bisa diberikan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia,

namun dari kelestarian dan kenyamanan untuk manusia dan lingkungan.

2.2.2. Aspek

Menurut UNWTO dalam dokumen Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan *Green Jobs* untuk Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pemahaman secara jelas kaitan antara ketiga aspek tersebut, dapat dilihat pada gambar 2.5.



Gambar 2. 5 Diagram Aspek Pariwisata Berkelanjutan

Sumber : <https://mytriplan.travel/sustainable-tourism/> (diakses pada 14 Oktober 2022)

Menurut peraturan Kemenparekraf mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, kriteria keberlanjutan itu sendiri dijelaskan seperti berikut (KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF, 2020) :

A. Ekonomi

Kriteria aspek ekonomi mencakup 3 poin, yakni:

1. Mengukur kontribusi ekonomi pariwisata

Parameter dan bukti pendukung dalam mengukur kontribusi ekonomi pariwisata, dapat dilihat dengan adanya kontribusi ekonomi secara langsung dan tak langsung terhadap perekonomian destinasi. Penggolongan kontribusi dapat berupa total pengunjung, pengeluaran pengunjung, lapangan pekerjaan, penanaman modal, dan bukti distribusi manfaat ekonomi.

2. Peluang kerja dan karir

Parameter dan bukti pendukung dalam peluang kerja adalah dengan adanya

peraturan dan perundang-undangan yang mengatur agar perusahaan di destinasi pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan, peluang pelatihan, keselamatan kerja, dan honorarium yang adil (sesuai dengan UMR) untuk semua golongan masyarakat (perempuan, generasi muda, penyandang cacat, kelompok minoritas, dll).

3. Menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan

Parameter dan bukti pendukung dalam menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan adalah dengan adanya program yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) supaya dapat meningkatkan nilai produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip perdagangan yang adil.

B. Sosial

Kriteria aspek sosial mencakup 5 poin, yakni:

1. Dukungan bagi masyarakat

Terdapat sistem yang membawa badan usaha, pengunjung, dan publik untuk menyumbang kepada masyarakat dengan cara yang bertanggung jawab.

2. Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi

Terdapat peraturan dan perundang-undangan yang melarang terjadinya komersialisasi, eksploitasi, pelecehan seksual, atau bentuk pelanggaran lainnya yang terjadi terhadap anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas.

3. Hak kepemilikan dan pengguna

Terdapat peraturan dan perundang-undangan mengenai hak kepemilikan dan pengambilalihan kepemilikan yang terdokumentasikan dan ditegakkan. Peraturan dan perundang-undangan tersebut juga mengamankan pengguna dan hak akses kepada sumberdaya yang penting.

4. Keselamatan dan keamanan

Terdapat sistem untuk mengawasi, mencegah, melaporkan secara terbuka kepada umum, dan menanggapi bahaya kejahatan, keamanan dan kesehatan yang dapat berpengaruh pada kebutuhan pengunjung dan penduduk setempat.

5. Akses untuk semua

Terdapat program yang memastikan supaya masyarakat lokal dapat tetap memiliki akses ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama, dan spiritual di destinasi

pariwisata. Hal ini juga ditujukan bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik yang memerlukan akses khusus. Bagi situs yang tidak dapat langsung diakses, akses diberikan melalui solusi yang dirancang dan diterapkan namun dengan tetap mempertahankan integritas situs dan dukungan bagi orang-orang yang memerlukan akses khusus ini tetap dapat dipenuhi.

C. Budaya

Kriteria aspek budaya terdiri dari 2 sub poin, yakni:

1. Melindungi warisan budaya

Mencakup 5 kriteria, yakni:

a. Perlindungan aset budaya

Terdapat kebijakan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan mengkonservasi aset-aset budaya, seperti bangunan warisan dan bentang-alam budaya.

b. Artefak budaya

Terdapat undang-undang yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, dan pemberian artefak sejarah dan arkeologi. Undang-Undang tersebut ditegakkan dan dipublikasikan kepada publik, seperti badan usaha pariwisata dan pengunjung.

c. Warisan tak-benda

Terdapat dukungan terhadap perayaan dan perlindungan warisan budaya tak-benda, seperti tradisi, seni, musik, bahasa, gastronomi setempat dan aspek-aspek lain tentang identitas dan kekhasan setempat.

d. Akses tradisional

Terdapat sistem untuk mengawasi, melindungi dan merehabilitasi akses masyarakat saat berkunjung ke situs-situs alam dan budaya.

e. Hak kekayaan intelektual

Terdapat sistem yang turut andil dalam perlindungan dan preservasi hak kekayaan intelektual masyarakat dan perorangan.

2. Mengunjungi situs budaya

Terdapat 2 kriteria, yaitu:

a. Pengelolaan pengunjung pada situs budaya

Terdapat sistem untuk mengatur pengunjung di dalam dan di sekitar situs-situs budaya, yang memperhatikan dari segi karakteristik, kapasitas dan kepekaan

mereka, dan mengupayakan arus pengunjung supaya dapat meminimalkan dampak negatif. Panduan untuk perilaku pengunjung di situs-situs dan peristiwa budaya yang sensitif akan tersedia bagi pengunjung, operator perjalanan dan pemandu wisata waktu sebelum dan saat kunjungan.

b. Interpretasi Situs

Tersedia materi interpretasi yang akurat, memperkenalkan pentingnya aspek-aspek budaya dan alam dari situs yang dikunjungi kepada pengunjung. Informasi yang diberikan dapat dibahas bersama masyarakat tuan rumah dan dibagikan dengan jelas menggunakan bahasa yang dimengerti baik oleh pengunjung dan penduduk setempat

D. Lingkungan

Kriteria aspek lingkungan terdiri dari 3 sub poin, yakni:

1. Konservasi warisan alam

Mencakup 4 kriteria, yakni:

a. Perlindungan lingkungan sensitif

Adanya sistem untuk mengawasi, mengukur dan merespon dampak pariwisata terhadap lingkungan alami, konservasi ekosistem, habitat dan spesies, dan mencegah masuknya dan tersebarnya spesies asing invasif.

b. Pengelolaan pengunjung pada situs alam

Terdapat sistem untuk mengelola pengunjung di dalam dan di sekitar situs alam, yang memperhitungkan karakteristik, kapasitas dan sensitivitas alam tersebut dan mengupayakan arus pergerakan pengunjung supaya dapat meminimalkan dampak buruk.

c. Interaksi dengan kehidupan liar

Terdapat sistem yang memastikan kepatuhan masyarakat akan Undang-Undang dan standar lokal, nasional dan internasional dalam berinteraksi di kehidupan liar. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap satwa dan perilaku populasi di alam liar.

d, Eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa

Adanya sistem yang memastikan kepatuhan masyarakat akan Undang-Undang dan standar lokal, nasional dan internasional yang mengusahakan kepastian

terhadap kesejahteraan satwa dan konservasi spesies (hewan, tumbuhan dan semua organisme hidup).

2. Pengelolaan sumberdaya

Mencakup 3 kriteria, yakni:

a. Konservasi energi

Terdapat indikator yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi saat pemakaiannya, dan peningkatan pemanfaatan energi terbaharukan.

b. Penatalayanan air

Adanya usaha untuk mendorong badan-badan usaha untuk mengukur, mengawasi, melaporkan secara terbuka dan mengelola pemakaian air. Risiko air di destinasi akan dikaji dan di dokumentasi.

c. Kualitas air

Terdapat sistem untuk mengawasi kualitas air untuk minum, rekreasi, dan tujuan ekologi dengan berpegang pada standar baku.

3. Pengelolaan limbah dan emisi

Mencakup 5 kriteria, yakni:

a. Air limbah

Adanya panduan yang jelas untuk penempatan, pemeliharaan, dan uji coba buangan dari sistem *septic tank* dan pengolahan air limbah.

b. Limbah padat

Terdapat sistem untuk mengukur dan melaporkan limbah yang dihasilkan dan penentuan target untuk dapat mengurangnya. Destinasi menjamin jika limbah padat akan ditangani dengan baik dengan menyediakan sistem pengumpulan daur-ulang yang dibagi berdasarkan jenisnya.

c. Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim

Memiliki capaian untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menerapkan, dan melaporkan tentang kebijakan dan tindakan mitigasinya.

d. Transportasi berdampak rendah

Memiliki capaian untuk bisa mengurangi emisi penggunaan transportasi dari perjalanan ke dan dalam destinasi. Penggunaan kendaraan rendah emisi dan

berkelanjutan (jalan kaki dan bersepeda) dianjurkan untuk dilakukan agar dapat mengurangi pencemaran udara, kemacetan dan perubahan iklim dalam kegiatan pariwisata.

e. Pencemaran cahaya dan kebisingan

Adanya panduan dan peraturan untuk meminimalisir pencemaran cahaya dan kebisingan.

2.2.3. Prinsip

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012), prinsip yang diterapkan dalam pariwisata berkelanjutan mengacu pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dengan adanya kesamaan prinsip, diharapkan adanya orientasi pengembangan yang sama juga yaitu (Sulistyadi, Eddyono, & Hasibuan, 2017) :

1. Pariwisata berbasis masyarakat (*Community based tourism*)

Prinsip ini memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung saat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengambilan keputusan saat pengembangan pariwisata yang dilakukan di daerahnya.

2. Berorientasi konservasi

Kesejahteraan rakyat dicapai melalui upaya konservasi (hak intelektual dan budaya lokal) serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

3. Daya dukung

Bertujuan untuk melindungi pengembangan pariwisata yang berdampak negatif bagi sekitar. Prinsip ini didukung oleh dua faktor, yakni motivasi wisatawan dan faktor lingkungan biofisik di lokasi pariwisata.

4. Pendidikan dan pelatihan

Dibutuhkannya pembaharuan ilmu pengetahuan dan ahli teknologi dalam melakukan pengelolaan pariwisata, supaya obyek pariwisata dapat unggul dalam persaingan pasar.

5. Promosi

Berupa kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengampanyekan nilai-nilai keberlanjutan dari pariwisata yang ada. Tujuan promosi yakni untuk memberi kesadaran bagi pihak penting akan prinsip berkelanjutan, mengantisipasi

adanya kegiatan yang merugikan di masa depan, dan meminimalisir adanya hantaman kepentingan antara *stakeholder* dalam menggunakan sumber daya alam maupun budaya serta pembangunan sarana/prasarana pariwisata.

6. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dilakukan dalam dua tahap yakni, terhadap perencanaan (pemantauan tujuan dan jadwal) dan pelaksanaan. Kemudian evaluasi dilakukan supaya dapat meningkatkan efektifitas pembangunan pariwisata.

